

INTISARI

DEPOLITISASI MAHASISWA ERA DEMOKRATISASI : “Tinjauan Kritis atas SK DIKTI NO. 26 TAHUN 2002 terhadap Gerakan Ekstra Kampus di Universitas Gadjah Mada”

SK DIRJEN DIKTI NO. 26 TH. 2002, merupakan wacana dominan yang dikonstruksi oleh pemerintah sebagai upaya untuk mendepolitisasi serta membatasi ruang-ruang demokratik gerakan mahasiswa di lingkungan kampus. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) wacana depolitisasi mahasiswa, (2) bentuk praktik depolitisasi terhadap gerakan ekstra kampus dan (3) Strategi perlawanan gerakan ekstra kampus merespon praktik depolitisasi di lingkungan kampus UGM.

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan analisis wacana dan dikontekstualisasikan dengan konsep Depolitisasi Subjek James Ferguson serta Foucault tentang Kuasa, Pengetahuan dan Wacana sebagai landasan teoritis.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) melalui wacana dominan, penguasa mengkonstruksi SK Dirjen Dikti Nomor 26 Tahun 2002 sebagai teknik bekerjanya *the disciplinary power* untuk menormalisasi kehidupan gerakan mahasiswa, dengan membentuk subjek mahasiswa melalui *The Anti-Politic Machine* (atau mesin anti-politik). (2) ada dua bentuk praktik depolitisasi mahasiswa yang terjadi di Universitas Gadjah Mada. Pertama, praktik depolitisasi konvensional yang dilakukan dengan cara represif, seperti: pengusiran dan pembubaran kegiatan serta pelarangan mengakses sarana dan prasarana kampus. Kedua, praktik depolitisasi modern yang dilakukan melalui cara internalisasi, persuasif dan meyakinkan bahkan tidak ada unsur paksaan agar subjek tidak merasa di dominasi. Seperti: pembatasan masa studi menjadi 5 tahun, adanya sistem SKS, berlakunya sistem pembayaran UKT, presensi kehadiran mahasiswa wajib 75%, sistem presensi menggunakan *finger-print*, kegiatan PPSMB diambi alih oleh rektorat dan penyetaran BEM dan UKM sebagai upaya untuk menghapuskan *student government*. Dampak dari praktik depolitisasi tersebut menyebabkan tumpulnya kepekaan, daya kritis dan kreativitas mahasiswa, membangun paradigma negatif tentang gerakan mahasiswa sehingga menurunkan minat mahasiswa untuk bergabung dengan gerakan ekstra kampus dan memudarnya eksistensi gerakan ekstra kampus dalam kehidupan mahasiswa. (3) Strategi perlawanan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi dan peranan gerakan ekstra kampus, yaitu: bekerja sama dengan organisasi intra untuk mengadakan kegiatan di dalam kampus, membuat program-program kerja organisasi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, mengadakan diskusi dengan organisasi ekstra yang lain, mengkritisi kebijakan pemerintah melalui tulisan ilmiah serta memaksimalkan kecanggihan teknologi untuk menyebarkan informasi.

Kata Kunci: Wacana, Gerakan Ekstra Kampus, Depolitisasi, Kebijakan.

ABSTRACT

STUDENT DEPOLITICIZATION IN THE DEMOCRATIZATION ERA: Critical Review of SK DIKTI NO. 26 TH. 2002 on the Extra Campus Movement at Gadjah Mada University

SK DIRJEN DIKTI NO. 26 TH. 2002, is a dominant discourse constructed by the government as an attempt to depoliticize and limit the democratic spaces of the student movement in the campus. This study aims to analyze three main problems, such as: (1) discourse on students depoliticization, (2) forms of depoliticization practices on extra campus movements and (3) Strategy of resistance extra campus movements responding the depoliticization practices in the UGM.

This research was compiled using a discourse analysis approach and contextualized with James Ferguson's concept and Foucault's concept about Power, Knowledge and Discourse as a theoretical foundation.

The results of this study indicate (1) through a dominant discourse, SK DIRJEN DIKTI NO. 26 TH. 2002 as a technique for working the disciplinary power to normalize the life of the student movement, by forming a student subject by The Anti-Politic Machine (2) there are two forms of student depoliticization practices that occur at Gadjah Mada University. First, the practice of conventional depoliticization carried out by repressive methods, such as: expulsion and dissolution of activities and prohibitions on accessing campus facilities and infrastructure. Second, the practice of modern depoliticization is carried out through internalization, persuasiveness and convincing, and there is even no element of coercion so that the subject does not feel dominated. Such as: the limitation of study period to 5 years, the existence of a credit system per semester (SKS), the enactment of the UKT payment system, the presence of mandatory student attendance of 75%, the attendance system using finger-print, PPSMB activities taken over by the rector, BEM and UKM as an effort to eliminate student government. The impact of the depoliticization practice caused a decrease in sensitivity, critical power and creativity of students, building a negative paradigm about the student movement so as to reduce the interest of students to join the extra campus movement and the waning existence of extra campus movements in student life. (3) Resistance strategies carried out to maintain the existence and role of extra campus movements, such as: working with intra organizations to hold activities on campus, create organizational work programs that suit the needs of students, hold discussions with other extra organizations, criticize government policies through scientific writing and maximize technological sophistication to disseminate information.

Keywords: *Discourse, Extra Campus Movement, Depolitization, Policy.*